AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam
Volume. 2 Nomor. 2 Mei 2025
e-ISSN: 3064-0970, p-ISSN: 3064-1519, Hal 109-125
DOI: https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i2.151
Available Online at: https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL

Jejak Kekuasaan Dinasti Fatimiyah: Perebutan Maghribi, Penaklukan Mesir, dan Munculnya Sekte Darazi

Anisatun Hikmah[1], Nadira Fauziah[2], M. Rizky Yahya[3], Ahmad Maftuh Sujana[4]
[1-4] Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
E-mail: anisatunhikmah91@gmail.com[1], nadiraapril4@gmail.com[2], adiypp085@gmail.com[3], maftuhsujana@gmail.com[4]

Abstract: *The Fatimid Dynasty was an Isma'ili Shia caliphate established in the early 10th century CE, ruling over North Africa and later Egypt. This article examines the legacy of the Fatimid Dynasty, which ruled from 909 to 1171 CE, focusing on their conquest of the Maghreb region and the pivotal takeover of Egypt that marked a significant milestone in their history. Claiming direct descent from Fatimah az-Zahra, the daughter of the Prophet Muhammad, the Fatimids established their capital in Cairo and fostered the growth of Islamic culture and education, including the founding of Al-Azhar University. The article also explores the emergence of the Darazi sect as part of the internal dynamics within Ismaili Shi'ism, which influenced the political and religious landscape of the dynasty. The rise and decline of the Fatimid Dynasty were shaped by both internal challenges and external pressures until its eventual fall in the 12th century. This study provides a comprehensive overview of the political, military, social, and religious aspects that defined the Fatimid Dynasty's role in Islamic history.*

Keywords: *Fatimid Dynasty, Maghreb Struggle, Conqest of Egypt, Darazi Sect.*

Abstrak: Dinasti Fatimiyah merupakan kekhalifahan Syiah Ismailiyah yang berdiri pada awal abad ke-10 M dan berkuasa di wilayah Afrika Utara hingga Mesir. Artikel ini mengkaji jejak kekuasaan Dinasti Fatimiyah yang berdiri sejak tahun 909 M hingga 1171 M, dimulai dari perebutan wilayah Maghrib dan penaklukan Mesir yang menjadi tonggak penting dalam sejarah dinasti ini. Dinasti Fatimiyah, yang mengklaim keturunan langsung dari Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad, berhasil mengukir kejayaan dengan mendirikan pusat pemerintahan di Kairo serta mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam, termasuk pendirian Universitas Al-Azhar. Selain itu, artikel ini juga membahas munculnya sekte Darazi sebagai bagian dari dinamika internal Syiah Ismailiyah yang berperan dalam politik dan agama dinasti tersebut. Kejayaan dan kemunduran Dinasti Fatimiyah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal hingga akhirnya runtuh pada abad ke-12. Studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang aspek politik, militer, sosial, dan keagamaan yang membentuk perjalanan Dinasti Fatimiyah dalam sejarah Islam.

Kata kunci: Dinasti Fatimiyah, Perebutan Maghribi, Penaklukan Mesir, Sekte Darazi.

1. PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah Islam, berbagai dinasti memiliki peran signifikan dalam membentuk arah perkembangan politik, sosial, dan religius dunia Islam. Di antara dinasti-dinasti tersebut, Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu yang paling menonjol dari kalangan Syiah Ismailiyah. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi pada penghujung abad ke-9 Masehi (297 H) di kawasan Maghrib (Afrika Utara), setelah berhasil mengakhiri kekuasaan Dinasti Aghlabiyah. Klaim keturunan langsung dari Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, menjadi dasar utama bagi legitimasi teologis Dinasti Fatimiyah, terutama di tengah dominasi kekhalifahan Sunni saat itu.(Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.550)

Kesetiaan terhadap Ali bin Abi Thalib menjadi isu sentral bagi komunitas Syiah dalam merumuskan pandangan keislamannya, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan

Received: April 20, 2025; Revised: Mei 04, 2025; Accepted: Mei 18, 2025; Published: Mei 20, 2025

aspek hukum dan spiritualitas. Pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, persoalan ini berkembang menjadi gerakan politik yang memunculkan perlawanan terhadap kekuasaan Dinasti Umayyah dan kemudian Dinasti Abbasiyah. Meskipun Dinasti Abbasiyah mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu yang panjang, masa kejayaannya berlangsung relatif singkat. Kemunduran kekuasaan Abbasiyah mencapai titik krusial ketika munculnya kekhalifahan-kekhalifahan kecil yang memisahkan diri dari otoritas politik pusat Abbasiyah.Salah satu kekhalifahan yang memerdekakan diri tersebut adalah Dinasti Fatimiyah, yang berasal dari kalangan Syiah sekte Ismailiyah suatu cabang dalam Syiah yang muncul akibat perbedaan pandangan mengenai suksesi Imam Ja'far al-Shadiq (wafat 756 M).(Susmihara, 2016, hlm.50)

Perjalanan politik Dinasti Fatimiyah diwarnai oleh berbagai dinamika dan tantangan. Sejak masa awal pemerintahannya, Ubaidillah harus menghadapi sejumlah konflik dan pergolakan di wilayah Maghribi yang mengancam stabilitas kekuasaan. Namun, berkat kepemimpinan tokoh-tokoh strategis seperti Ismail Abi Thahir al-Manshur, kekuasaan Fatimiyah berhasil diperluas hingga mencapai wilayah timur, termasuk penaklukan Mesir pada tahun 969 M. Keberhasilan ini menjadi titik balik kejayaan Dinasti Fatimiyah, yang ditandai dengan pendirian kota Kairo serta pembangunan Masjid al-Azhar, yang kelak menjadi pusat intelektual dan dakwah bagi mazhab Syiah Ismailiyah. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.551)

Pada puncak masa kejayaannya, Dinasti Fatimiyah juga mengalami perkembangan ideologis yang cukup mencolok, salah satunya ditandai dengan kemunculan sekte Darazi (Druze), yang merupakan aliran ekstrem dari ajaran Ismailiyah. Sementara itu, pada fase kemunduran, kekuasaan khalifah Fatimiyah mulai melemah, dan hal ini membuka jalan bagi dominasi para menteri dalam struktur pemerintahan, sehingga menandai terjadinya transformasi dalam sistem politik dinasti tersebut.

Studi ini bertujuan untuk menelusuri perjalanan kekuasaan Dinasti Fatimiyah, mulai dari fase awal di wilayah Maghribi, proses ekspansi ke Mesir, pembangunan institusi-institusi penting, hingga munculnya sekte Darazi serta peralihan kekuasaan ke tangan para pejabat tinggi. Melalui pendekatan historis dan telaah pustaka, artikel ini berupaya memberikan wawasan yang komprehensif mengenai dinamika internal serta kontribusi Dinasti Fatimiyah dalam sejarah Islam pada era pertengahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Kajian ini bertumpu pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan sejarah Dinasti Fatimiyah. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dari sejarawan Muslim seperti al-Maqrizi dan Ibnu Khaldun, sementara sumber sekunder mencakup buku-buku akademik dan artikel ilmiah karya sejarawan kontemporer seperti Farhad Daftary, Heinz Halm, dan Michael Brett.

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, seperti buku-buku sejarah Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen-dokumen yang relevan yang membahas Dinasti Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, serta wacana kekhalifahan dalam Islam. Beberapa sumber utama yang dijadikan rujukan meliputi karya sejarawan Muslim klasik maupun peneliti modern, baik dari kalangan Timur Tengah maupun Barat. Validitas data dijaga melalui pemilihan sumber yang kredibel, akademis, dan memiliki otoritas dalam bidangnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelaah buku sejarah, serta hasil penelitian terdahulu mengenai Dinasti Fatimiyah, perkembangan politik di wilayah Maghribi, ekspansi ke Mesir, pembangunan kota Kairo dan Masjid al-Azhar, serta munculnya sekte Darazi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan tujuan memahami pola kekuasaan, transformasi ideologi, dan dinamika sosial-keagamaan dalam sejarah Dinasti Fatimiyah.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian sejarah Islam, khususnya terkait eksistensi dan pengaruh Dinasti Fatimiyah dalam perkembangan politik dan pemikiran keislaman pada abad pertengahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Fathimiyah ‘Ubaydiyah (297-567 H)

Dalam perkembangan sejarahnya, aliran Syi’ah selalu menjadi golongan marginal, baik pada masa Dinasti Umayyah maupun Dinasti Abbasiyah, walaupun tatkala Dinasti Abbasiyah berjuang dan berhasil mengambil alih kekuasaan dari Dinasti Umayyah yang pada saat itu mempunyai andil besar. Tahun 172 H/789M berdiri Dinasti Idrisiyah yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris ibn Abdillah di Maroko. Dinasti Idrisiyah berkuasa sampai tahun 314H/926M.(Usman, 1976, hlm.119)

Dinasti Fatimiyah menerapkan strategi serupa dengan yang digunakan oleh Dinasti Abbasiyah dalam membangun kekuasaannya. Mereka memulai langkah politiknya melalui

penyebaran propaganda ideologis di berbagai wilayah, seperti Mesir, Maghrib, dan Yaman. Upaya ini memperoleh sambutan luas, terbukti dari banyaknya pengikut yang berhasil mereka kumpulkan, termasuk di kalangan pejabat tinggi, seperti para menteri dari fase akhir pemerintahan Dinasti Aghlabiyah. Tokoh sentral dalam penyebaran ajaran Fatimiyah pada tahap awal ini adalah Abu Abdillah Ali ibn Hawsyab al-Syi'i, yang mulai mengembangkan misi dakwahnya di wilayah Maghrib sejak tahun 280 H, dan kemudian meluas ke Afrika Utara pada tahun 289 H. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.551)

Dinasti Fathimiyah adalah satu-satunya Dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 M, sebagai tandingan bagi penguasa penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abasyiah. Dinasti Fatimiyyah didirikan oleh Sa'id ibn Husayn. Kemunculan Sa'id penerus ibn Maymun yang sangat mencengagkan ini merupakan puncak dari propaganda sekte Ismailiyah yang terampil dan terorganisir dengan baik. Kesuksesan mereka itu sama dengan kesuksesan gerakan pertama sekte ini, yang pernah berhasil menggoyang kekhalifahan Umayyah. Keberhasilan gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya personal dai (propagandis) utama sekte ini, yaitu Abu Abdullah al-Husayn al-Syi'i. Ia adalah seorang penduduk asli Shan'a Yaman, yang menjelang awal abad ke-9 memproklamirkan dirinya sebagai pelopor Mahdi dan menyebarkan hasutan di tengah suku Barbar di Afrika Utara, khusunya suku Kitamah. Perkenalannya dengan anggota suku ini terjadi pada musim haji di Mekah. Wilayah Afrika kecil, Tunisi dan Afrika Utara ketika itu beraada di bawah kekuasaan Aglabiyah. (Philip, 2013, hlm.860)

Abu Abdillah al-Syi'i mampu menghimpun kekuatan militer dan melancarkan serangkaian pertempuran melawan Dinasti Aghalibah selama kurang lebih lima tahun hingga tahun 296 H. Akhir dari konflik tersebut adalah runtuhnya kekuasaan Aghalibah. Setelah kemenangan itu, pengaruh Fathimiyah meluas ke hampir seluruh kawasan Maghribi, bahkan mereka berhasil menguasai seluruh wilayah di sebelah barat kota Qayrawan secara penuh. Dalam situasi peperangan tersebut, Abu Abdillah al-Syi'i mengirim surat kepada 'Ubaydillah, memintanya untuk datang ke wilayah Maghribi. Permintaan itu disambut positif oleh 'Ubaydillah yang segera memulai perjalanan secara sembunyi-sembunyi menuju tujuan tersebut. Ketika melintasi Mesir, ia mendapat sambutan baik dari penduduk dan berhasil menarik banyak pengikut. Meski menghadapi berbagai kesulitan di perjalanan, ia akhirnya tiba di kota Sijilmasah. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.551)

Setelah menjadi khalifah Ubaydullah al-Mahdi mengadakan reformasi ke dalam yaitu mengubah sistem perpajakan dan reformasi ke luar yakni memperkuat angkatan laut untuk mengembangkan ekspedisi militer. Dari basis mereka di Afrika, mereka segera

mengumpulkan berbagai perlengkapan dan kekayaan untuk memperluas kekuasaannya dan perbatasan Mesir sampai provinsi Fez di Maroko. Kemudian mereka bergerak ke arah timur dan berhasil menaklukkan Alexandria, menguasai Syiria, Malta, Sardinia, Cosrica, Pulau Betrix dan pulau lainnya. Selanjutnya pada tahun 920 M ia mendirikan Kota Baru di Pantai Tunisia yang kemudian diberi nama al-Mahdiyah. (O'leary, 1923, hlm.77)

Di kota Sijilmasah, 'Ubaydillah dapat hidup dengan tenang setelah menyerahkan sejumlah harta kepada penguasa setempat, al-Yasa' ibn Midrar. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sikap al-Yasa' berubah drastis setelah ia mengetahui kemenangan Abu Abdillah al-Syi'i atas Dinasti Aghlabiyah pada tahun 296 H. Akibatnya, 'Ubaydillah beserta para pengikutnya ditangkap dan dipenjara. Ketika pasukan Abu Abdillah al-Syi'i tiba di Sijilmasah, al-Yasa' melarikan diri, dan 'Ubaydillah pun segera dibebaskan dari tahanan. Setelah pembebasan itu, 'Ubaydillah menerima baiat dari para pendukungnya. Dengan membawa pasukan dalam jumlah besar, ia bergerak menuju Raqqadah, bekas ibu kota Dinasti Aghlabiyah. Di sana, ia disambut dengan hangat oleh penduduk setempat dan menetapkan Raqqadah sebagai pusat pemerintahannya. Ia pun memerintahkan agar namanya disebut dalam khutbah di seluruh wilayah. Gelar al-Mahdi Amirul Mukminin disematkan kepadanya, menandai berdirinya Dinasti Fatimiyah di wilayah Afrika Utara. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.551-552)

'Ubaydillah Menghadapi Sejumlah Pergolakan di Maghribi

Abu Abdillah al-Syi'i memiliki peran besar dalam mengukuhkan kedudukan 'Ubaydillah, sehingga ia memperoleh tempat istimewa di kalangan masyarakat Maghribi, khususnya suku Ketama, kelompok Berber yang memberikan banyak dukungan kepada 'Ubaydillah. Sebelum Abdullah bin Maimon meninggal pada 874 M, ia menunjuk pengikut Yaman yang paling bersemangat, Abu Abdullah al-Shi'i Mengapa Pemimpin gerakan Syiah Ismailiyah (S. M. Amin, 2015). Seorang pendukung yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pelopor al-Mahdi. Namun, hal ini memicu kecemburuan dalam diri 'Ubaydillah, yang mulai merasa terancam dengan pengaruh al-Syi'i yang semakin besar. Diliputi kekhawatiran akan hilangnya kekuasaan, 'Ubaydillah memerintahkan pembunuhan terhadap al-Syi'i dan saudaranya, al-'Abbas, yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 298 H. Tindakan ini memicu kemarahan penduduk Maghribi, terutama dari suku Ketama, yang kemudian melakukan pemberontakan. Meski demikian, 'Ubaydillah berhasil memadamkan perlawanan tersebut.

Ambisi 'Ubaydillah untuk menguasai seluruh wilayah Maghribi pun semakin besar. Pada tahun 312 H, dengan bantuan Musa ibn Abi al-'Afiyah, ia berhasil mengakhiri kekuasaan Dinasti al-Idarisah. Namun, setelah memperoleh pengaruh yang cukup besar, Musa memisahkan diri dari Dinasti Fathimiyah dan memilih untuk setia kepada Abdurrahman al-Nashir di Andalusia. Sebagai tanggapan atas pengkhianatan ini, pada tahun 315 H, 'Ubaydillah mengutus putranya yang juga merupakan pewaris tahta, Abu al-Qasim al-Qa'im, untuk menghadapi Musa ibn Abi al-'Afiyah. Misi tersebut berhasil dijalankan dengan sukses. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.553)

Dalam rangka memperkuat kekuasaannya, 'Ubaydillah membangun kota al-Mahdiyyah yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Kota ini dirancang dengan pertahanan yang kuat, dikelilingi oleh lautan dari tiga sisi. Selain itu, di kota tersebut, ia juga mendirikan sebuah pabrik sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur kekuasaan.

Pada tahun 316 H, Abu Yazid Makhlad ibn Kaydad melancarkan pemberontakan yang terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada masa pemerintahan al-Qa'im, putra sekaligus penerus 'Ubaydillah. Abu Yazid berasal dari kota Turaz, di mana ia mempelajari Al-Qur’an dan menganut paham Khawarij aliran Shafariyah, yang sangat menentang kelompok Syi’ah. Pada tahun 331 H, sisa-sisa pengikut Khawarij dan beberapa suku Barbar mengangkatnya sebagai pemimpin dalam perjuangan melawan kaum Syi’ah. Kaum Barbar sebelumnya telah berhasil menguasai wilayah Andalusia dan memberikan dukungan besar kepada Dinasti Fatimiyah dalam perebutan kekuasaan khilafah. Namun, setelah keberhasilan tersebut, mereka merasa diabaikan dan tidak memperoleh imbalan apa pun. Hal ini mendorong Abu Yazid untuk berjuang mengembalikan hak serta kekuasaan yang mereka anggap telah dirampas.

Al-Qa'im dikenal memiliki reputasi yang lebih buruk dibandingkan ayahnya, 'Ubaydillah. Ia dituduh sebagai seorang zindiq yang terkutuk, menghina para nabi, serta bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah ulama. Ia wafat pada tahun 334 H. Pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Yazid sempat mengguncang stabilitas Dinasti Fatimiyah sebelum akhirnya berhasil ditumpas pada 336 H. Meskipun demikian, kekuasaan Dinasti Fatimiyah di kawasan Maghribi semakin merosot. Beberapa wilayah mereka di Afrika Utara pun lepas sebagai dampak dari pemberontakan tersebut. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.553)

Isma'il Abi Thahir al-Manshur (334 H)

Setelah wafatnya al-Qa'im, kepemimpinan Dinasti Fatimiyah beralih kepada Abu Thahir al-Manshur. Pada tahun 337 H, al-Manshur mendirikan kota al-Manshuriyah dan menetapkannya sebagai pusat pemerintahan. Kota ini dilengkapi dengan lima gerbang utama: gerbang depan (al-bab al-qubuli), gerbang timur (al-bab al-syargi), gerbang Zuwayla (al-bab al-zuwaylah), gerbang Ketama (al-bab al-Kitamah), dan gerbang penaklukan (al-bab al-futub), dari mana pasukan Fatimiyah biasanya berangkat untuk berperang. Pada masa kepemimpinan al-Manshur, sektor perdagangan mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Seusai masa al-Manshur, tahta beralih kepada al-Mu'izz ibn al-Manshur, yang bertekad memperkuat dominasi Fatimiyah di wilayah Maghribi. Ia menunjuk Jawhar al-Siqilli sebagai panglima kepercayaannya untuk memberantas segala bentuk pemberontakan. Jawhar berhasil menjalankan tugas ini dengan efektif, sehingga dakwah Fatimiyah semakin luas tersebar di seluruh mimbar-mimbar Maghribi, kecuali di Ceuta dan Tangier.

Namun demikian, meskipun para khalifah Fatimiyah telah berusaha keras menegakkan kekuasaan mereka di Maghribi, kenyataannya mereka tidak pernah sepenuhnya berhasil. Setiap kali satu pemberontakan dapat dipadamkan, selalu muncul pemberontakan baru menggantikannya. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.553)

Upaya Fathimiyah Menaklukkan Mesir

Kemunculan dinasti Fathimiyyah dilatarbelakangi karena melemahnya Dinasti Abbasiyah di Bagdad (Asriati Amliyah, 2013:3). Ubaidillah al Mahdy mendirikan Dinasti Fathimiyyah setelah berhasil menumbangkan Gubernur Aghlabiyah. Dalam perkembangan sejarahnya, aliran Syi’ah selalu menjadi golongan marginal, baik pada masa Dinasti Umayyah maupun Abbasiyah.

Berdasarkan kondisi politik yang tidak stabil di wilayah Maghribi, Dinasti Fatimiyah kemudian mengalihkan fokusnya ke Mesir. Beberapa kali, 'Ubaydillah al-Mahdi mencoba menaklukkan negeri tersebut, namun selalu menemui kegagalan. Pada tahun 301 H, ia sendiri memimpin pasukan menuju Mesir. Namun, karena tidak dapat memasuki wilayah timur dan mencapai Fustat, ia memutuskan untuk bergerak melalui Alexandria dan distrik Barqah. Di sana, pasukannya mengalami kekalahan oleh tentara Abbasiyah, memaksanya kembali ke Maghribi. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.554)

Pada tahun 306 H, al-Mahdi kembali mengirim pasukan, kali ini di bawah pimpinan putranya, al-Qa’im. Mereka berhasil merebut kota Alexandria dan kemudian mengincar Giza.

Meskipun al-Qa'im berhasil menembus jauh ke wilayah Giza, upayanya digagalkan oleh Mu'nis al-Khadim yang bahkan membakar kapal-kapal Fatimiyah.

Tahun 321 H, al-Mahdi kembali mengirim pasukan, kali ini dipimpin oleh Habasy ibn Ahmad al-Maghribi. Namun, tahun berikutnya, pasukan tersebut dikalahkan oleh Muhammad ibn Thughj al-Ikhsyidi. Dua invasi awal Fatimiyah ke Mesir ini dilakukan dengan dukungan dari Ibnu Thahir al-Janabi, pemimpin Qaramithah di Bahrayn.

Dari Mesir Dinasti Fatimiyah tumbuh semakin luas sampai ke Palestina, dan kemudian propaganda Syiah Ismailiyah semakin tersebar luas melalui sebuah gerakan agen rahasia. Peran agama sangat diperhatikan sekali oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Sikap tegas khalifah fathimiyyah terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti Mazhab Syi'ah Ismailliyah akan dihukum berat dan bahkan sampai kehilangan nyawanya. (Nofrianti 7 Maghfira, 2024, hlm.29)

Kemudian pada tahun 322 H, al-Qa'im sebagai khalifah kembali mengirim ekspedisi ke Mesir. Alexandria dengan mudah direbut berkat dukungan sejumlah tokoh lokal, yang menunjukkan kuatnya pengaruh propaganda Fatimiyah di wilayah itu. Meski demikian, pasukan Fatimiyah tetap mengalami kekalahan dari tentara Ikhsyidiyah. Sejak saat itu, hubungan antara Dinasti Fatimiyah dan Mesir diwarnai intrik politik, pengintaian, dan strategi tipu muslihat.

Dari segi kondisi sosial, mayoritas khalifah fathimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non muslim. Pada masa al-Aziz non muslim dapat menduduki jabatan-jabatan penting di istana. Demikian pula masa al- Muntasir dan seterusnya, mereka dapat hidup Makmur dan penuh kedamaian. (Samsul Munir Amin, 2010: 265)

Pada 334 H, Kafur, gubernur Mesir berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik antara dua kekuatan besar: Dinasti Fatimiyah dan Kekhalifahan Abbasiyah. Ia saling bertukar hadiah dengan penguasa Maghribi, sembari tetap menunjukkan kesetiaannya kepada khalifah Abbasiyah. Di saat yang sama, al-Mu'izz li Dinillah, khalifah Fatimiyah, terus memperluas pengaruh ideologisnya di Mesir. Ia berhasil memperoleh dukungan (baiat) dari banyak penduduk dan pejabat Mesir, sebagian besar karena keberhasilannya membuka jalur rahasia dan membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Maghribi dengan Mesir pada 356 H.

Setelah Kafur wafat pada tahun 357 H, Mesir dilanda kekacauan. Krisis ekonomi, wabah penyakit, dan kekeringan memperburuk keadaan, hingga pemerintah tidak mampu

membayar gaji militer. Situasi ini mendorong para tokoh elite Mesir untuk mengirim surat kepada al-Mu'izz dan memintanya datang ke Mesir untuk memulihkan kondisi.

Maka, pada 14 Rabiul Awal 358 H, Jenderal Jawhar al-Siqilli memimpin ekspedisi besar ke Mesir bersama 100.000 pasukan berkuda. Mereka dapat merebut Alexandria tanpa perlawanan. Ketika kabar kedatangan Jawhar menyebar ke Fustat, Menteri Ja'far ibn al-Furat dan para pejabat tinggi segera mengajukan negosiasi. Pada 18 Rajab 358 H, mereka menemui Jawhar di Tarujah, markas Abu al-Mathamir, untuk menyusun syarat penyerahan dan jaminan keamanan bagi warga.

Jawhar menjamin keselamatan jiwa dan harta rakyat Mesir, serta menyatakan bahwa kehadirannya bertujuan untuk melakukan reformasi, bukan paksaan ideologi. Ia menegaskan bahwa penduduk akan tetap dibiarkan mengikuti mazhab Sunni dan tidak akan dipaksa memeluk Syi'ah. Namun, sebagian besar pasukan lokal menolak kesepakatan itu. Akibatnya, terjadi pertempuran hebat dengan pasukan Jawhar. Setelah kalah, pasukan Mesir akhirnya kembali memohon jaminan perlindungan. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.556)

Pembangunan Kairo dan Masjid al-Azhar

Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Fatimiyah membangun masjid Al Azhar yang akhirnya di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga berdirilah Universitas Al Azhar yang nantinya menjadi salah satu perguruan Islam tertua yang dibanggakan oleh ulama Sunni. (Nofrianti 7 Maghfira, 2024, hlm.29)

Mesir memasuki era baru di bawah kekuasaan Dinasti Fatimiyah. Pada tanggal 17 Sya'ban 358 H, dibangunlah kota baru bernama al-Manshuriyah di sebelah utara Fustat, sebagai simbol kekuasaan baru. Di kota ini juga didirikan istana besar yang disebut Istana Timur (al-Qashr al-Syarqi al-Kabir), yang kelak menjadi tempat tinggal Khalifah al-Mu'izz. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.556)

Nama al-Manshuriyah hanya bertahan selama empat tahun sebelum diganti menjadi al-Qahirah (Kairo), yang berarti "sang penakluk". Nama ini mencerminkan harapan bahwa kota tersebut akan menjadi kekuatan yang mampu menggulingkan dominasi Dinasti Abbasiyah. Jawhar al-Siqilli membangun tembok pertahanan kota lengkap dengan empat gerbang utama: Bab al-Nashr, Bab al-Futuh, Bab Zuwaylah, dan Bab al-Qus. Pada tahun 359 H, pembangunan Masjid al-Azhar dimulai dan memakan waktu dua tahun. Masjid ini dirancang sebagai pusat penyebaran paham Syiah Ismailiyah, karena Fatimiyah khawatir penyebaran mazhab tersebut melalui masjid-masjid umum akan memicu perlawanan dari

mayoritas Sunni di Mesir. Masjid al-Azhar mulai digunakan secara resmi pada 7 Ramadan 361 H, dan nama Khalifah al-Mu'izz pun mulai menggantikan nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat dan pada mata uang resmi. Bahkan, Jawhar melarang penggunaan pakaian hitam karena dianggap sebagai simbol Abbasiyah.(Walker, 2000, hlm.286)

Dalam teks khutbah, ditambahkan doa-doa yang menyanjung tokoh-tokoh utama Syiah, seperti Nabi Muhammad, Ali, Fathimah, Hasan, dan Husain. Dinasti Fatimiyah pun mengingkari janji awal mereka kepada penduduk Mesir. Warga dipaksa meninggalkan mazhab Sunni dan menganut Syiah. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dan peradilan diberikan kepada kaum Syiah. Banyak masjid diubah menjadi pusat penyebaran paham Syiah. Jabatan baru bernama da'i al-du'ah (propagandis utama) dibentuk dan memiliki wewenang besar dalam menyebarkan doktrin. Posisi ini berada satu tingkat di bawah qadhi al-qudhat (hakim agung) dan dibantu oleh dua belas utusan yang ditempatkan di berbagai wilayah. Dalam beberapa kasus, satu orang menduduki kedua jabatan tersebut sekaligus.(Daftary, 1990, hlm.210)

Kegiatan keagamaan diubah mengikuti tradisi Syiah, termasuk perayaan hari Ghadir dan hari wafatnya Husain di Karbala, yang memunculkan ketidaknyamanan di kalangan rakyat. Pada tahun 395 H, Khalifah al-Hakim bi Amrillah memerintahkan agar dinding-dinding dan pasar-pasar dihiasi dengan tulisan yang menghina para sahabat Nabi Muhammad. Namun, kebijakan ini dicabut tiga tahun kemudian, pada 398 H.(Breet, 2001, hlm.232)

Fatimiyah juga memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, Fathimah, dan Ali. Bahkan, mereka menambahkan lafaz "hayya 'ala al-'amal" dalam azan. Azan ini dipakai untuk menyambut kedatangan al-Mu'izz ke Mesir pada Sya'ban 362 H. Setibanya di istana yang telah disiapkan, al-Mu'izz langsung bersujud syukur. Jawhar menyambutnya dengan memberikan hadiah-hadiah mewah. Setelah itu, Kairo resmi dijadikan sebagai pusat kekuasaan Fatimiyah, yang menyebabkan semakddin menurunnya pengaruh mereka di kawasan Maghribi hingga akhirnya benar-benar hilang.(Kennedy, 2004, hlm.316)

Al-Mu'izz sangat berhati-hati terhadap kekuasaan yang dimiliki Jawhar. Ia khawatir kekuasaan militer yang besar akan mengancam posisinya sebagai khalifah. Oleh karena itu, secara bertahap, al-Mu'izz mengurangi pengaruh Jawhar dan mencabut semua otoritasnya. Menariknya, meskipun bersifat sektarian, Dinasti Fatimiyah dikenal cukup terbuka terhadap komunitas agama lain, terutama terhadap kaum Kristen dan Yahudi yang sering diajak bekerjasama.

a. Pada masa al-Mu'izz, dokter-dokter beragama Yahudi sering dimintai bantuan. Beberapa dari mereka juga menduduki jabatan penting di pemerintahan. Bahkan, Yaqub ibn Killis diangkat menjadi perdana menteri untuk al-Aziz ibn al-Mu'izz. Yaqub juga dipercaya meletakkan dasar-dasar negara dan peraturannya.
b. Al-Aziz menikahi seorang perempuan Kristen yang kemudian memiliki pengaruh cukup besar di pemerintahan. Keber-adaannya di istana mendorong adanya perayaan hari-hari besar kaum Kristen dan ritual-ritualnya. Banyak pejabat beragama Kristen yang duduk di Dewan-Dewan Kearsipan.
c. Al-Aziz menunjuk Minsya ibn Ibrahim al-Farar al-Yahudi sebagai Gubernur Syam

Pada tahun 393 H, Khalifah al-Hakim bi Amrillah mengeluarkan perintah yang mewajibkan komunitas Ahlu Dzimmah—yakni umat Kristen dan Yahudi yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam—untuk mengenakan pakaian khusus yang membedakan mereka dari umat Muslim. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 396 H, ia memerintahkan pembongkaran sejumlah gereja yang berada di wilayah Kairo. Namun, keputusan ini terasa kontradiktif ketika al-Hakim justru mengangkat seorang penganut Kristen bernama Manshur ibn 'Abdun sebagai perdana menterinya.(Lev, 1991, hlm.104)

Manshur kemudian memberikan saran yang kontroversial kepada al-Hakim, yakni agar gereja Qiyamah (Church of the Holy Sepulchre)—tempat suci umat Kristen di Yerusalem—dihancurkan. Al-Hakim mengabulkan permintaan tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor pemicu munculnya semangat di kalangan Kristen Eropa untuk melancarkan Perang Salib dan merebut kembali Baitul Maqdis.(JonathanRiley-Smith, 2005, hlm.18)

Penindasan terhadap komunitas Kristen dan Yahudi pun terus berlanjut, menyebabkan sebagian dari mereka terpaksa memeluk Islam demi menyelamatkan diri. Sebagian lainnya memilih mengungsi ke wilayah Kristen seperti Byzantium Timur, Habsyah (Ethiopia), dan Nubia. Namun, pada tahun 411 H, al-Hakim mengakhiri kebijakan represif ini.(Walker, 2000, hlm.295)

Khalifah berikutnya, al-Zhahir li-I'zaz Dinillah, menunjukkan pendekatan yang lebih lembut dan toleran terhadap Ahlu Dzimmah. Saat al-Mustanshir Billah naik takhta sebagai khalifah kedelapan Dinasti Fatimiyah, seorang tokoh Yahudi bernama Abu Sa'd Ibrahim ibn Sahl al-Tustari mendapatkan kedudukan terhormat. Pengaruhnya sangat kuat karena ibu al-Mustanshir sebelumnya adalah budak di keluarga al-Tustari dan tetap menjalin hubungan erat dengan mereka. Abu Sa’d dipercaya untuk menangani berbagai urusan penting pemerintahan.(Rustow, 2008, hlm.124)

Kepercayaan besar yang diberikan kepada al-Tustari membawa keuntungan besar bagi komunitas Yahudi di Mesir. Banyak dari mereka yang diberi posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan. Namun, pengaruh al-Tustari tidak bertahan lama karena pada tahun 439 H ia terbunuh. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.560)

Munculnya Sekte Darazi (Druze)

Menjelang akhir masa pemerintahan al-Hakim bi Amrillah, sekelompok orang Persia datang ke Mesir membawa misi dakwah Syi'ah Isma'iliyah. Mereka memperkenalkan paham ekstrem bahwa al-Hakim adalah manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia. Dakwah semacam ini memicu kemarahan umat Sunni di Mesir, yang kemudian mengusir mereka dari wilayah tersebut. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.560)

Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Muhammad ibn Isma'il al-Darazi, yang dikenal dekat dengan al-Hakim. Setelah terusir dari Mesir, al-Darazi melarikan diri dan menetap di beberapa desa di sekitar kota Inyas, sebuah wilayah kecil yang terletak di barat Damaskus. Di sana, ia terus menyebarkan ajarannya, termasuk gagasan kontroversial bahwa al-Hakim adalah penjelmaan Tuhan. Dakwahnya berhasil menarik banyak pengikut dari penduduk lokal. Para pengikut ajaran ini kemudian dikenal sebagai kelompok Daraziyah atau Druze.(Makarem, 1974, hlm.47)

Bagi al-Hakim sendiri, penyebaran ajaran tersebut justru memberikan legitimasi dan memperkuat posisinya sebagai penguasa absolut yang tidak bisa dibantah. Namun, setelah al-Hakim wafat, putranya al-Zhahir mengambil langkah berbeda. Tiga tahun setelah kematian al-Hakim, al-Zhahir secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap keyakinan yang menganggap ayahnya sebagai Tuhan. Di masa pemerintahan al-Mustanshir Billah (427–487 H), Mesir kembali dilanda berbagai bentuk kerusuhan besar yang mengguncang stabilitas negara.

a. Pasukan Sudan membuat kerusuhan dan kekacauan di al-Wajh al-Qibli.
b. Sekitar 4.000 orang pasukan berkuda dari suku Liwatah dan Badui, yang dipimpin Nashir al-Dawlah al-Husayn ibn Hamdan al-Taqghlabi (pembelot Dinasti Fathimiyah), mem-buat kekacauan di al-Wajh al-Bahri. Mereka menghancur-kan jembatan-jembatan dan saluran-saluran air. Ini mem-buat daerah al-Wajh al-Bahri tidak dapat menerima pasokan pangan dari Kairo dan Fusthtath.
c. Pada 462 H, Nashir al-Dawlah mengirim utusan kepada Alp Arslan, penguasa Bani Saljuk di Irak, dan memintanya supaya mengirim pasukan ke Mesir untuk menegakkan dakwah Abbasiyah. Nahsir al-Dawlah juga berjanji akan menyerahkan

kekuasaan Mesir ke tangannya. Alp Arslan menerima tawaran ini, tapi waktu itu ia tengah sibuk ber-jihad melawan Byzantium.

d. Pada 464 H, Nashir al-Dawlah melarang penyebutan nama Khalifah al-Mustanshir di mimbar-mimbar khutbah di daerah al-Wajh al-Bahri. Nashir juga mengirim utusan kepada Khalifah Abbasiyah kala itu (al-Qa'im), meminta surat pe-mecatan. Nashir lalu bertolak ke Fusthtath dan mengambil alih kekuasaan di Kairo. Ia mengirim upeti kepada Khalifah al-Qa'im sebesar 100 dinar per bulan sebagai bukti ke-setiaannya kepada Dinasti Abbasiyah. Kaum Turki di Mesir mencemaskan kezaliman Nashir pada diri mereka. Sebab itu, mereka bersepakat membunuhnya. Nashir pun dibunuh, juga semua keluarganya.

Pada tahun 466 H, situasi politik di Mesir semakin rumit ketika kendali pemerintahan jatuh ke tangan militer Turki. Khalifah al-Mustanshir Billah tak lagi memiliki otoritas yang nyata atas negerinya. Dalam kondisi genting ini, ia mengirim utusan ke Syam guna meminta bantuan kepada Badr al-Jamali, Gubernur Akka. Permintaan itu disertai syarat agar Badr membawa serta orang-orang terpercaya dari pasukan Armenia Syam, yang dianggap mampu memberikan pertimbangan strategis terkait dinamika militer di Mesir, khususnya mengenai faksi Turki, Maghribi, dan Sudan.(Breet, 2017, hlm.222)

Badr al-Jamali sendiri berasal dari latar belakang budak Armenia, sebelumnya dimiliki oleh Jamal al-Dawlah ibn ‘Ammar. Karier militernya menanjak setelah menunjukkan kecakapan dalam berbagai pertempuran di wilayah Syam, yang kemudian mengantarkannya diangkat sebagai Gubernur Syam oleh al-Mustanshir pada tahun 456 H. Selama menjabat, ia pernah memimpin pertempuran sengit melawan kekuatan Turki di kawasan tersebut, sebelum akhirnya dipindahkan ke Akka pada 460 H.

Ketika tiba di Mesir, Badr langsung mengambil tindakan tegas. Ia menyingkirkan para pemimpin faksi militer Turki yang selama ini menjadi sumber ketidakstabilan. Berkat langkah tersebut, keamanan dan stabilitas berhasil dipulihkan, dan otoritas Khalifah al-Mustanshir kembali diakui. Dengan pasukan yang masih terdiri atas berbagai unsur, termasuk sebagian yang beragama Kristen, Badr al-Jamali berhasil memperluas kembali pengaruh Fathimiyah ke seluruh Mesir, mulai dari wilayah selatan (al-Wajh al-Qibli) hingga Aswan, dan ke wilayah utara (al-Wajh al-Bahri). Pada masa ini pula, pembangunan Masjid al-Aththarin (Masjid Attarin) dilakukan sebagai simbol kemakmuran dan stabilitas.(Halm, 1996, hlm.102)

Situasi ekonomi juga mengalami perbaikan drastis. Antara tahun 457 hingga 464 H, pendapatan negara dari pajak mencapai kisaran dua juta hingga tiga juta seratus ribu dinar. Setelah Badr wafat pada tahun 487 H, peranannya dilanjutkan oleh putranya, al-Afdhal Syahinsyah. Namun, menjelang akhir hidupnya, Khalifah al-Mustanshir hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan para menterinya, tanpa kuasa yang nyata, hingga wafat pada 17 Zulhijjah 487 H. Sejak saat itu, Dinasti Fathimiyah memasuki fase baru yang ditandai oleh dominasi penuh para menteri atas pemerintahan. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.563)

Dinasti Fathimiyah II (Kekuasaan Para Menteri)

Masa ini diawali dengan perebutan kekuasaan antara Nizar, putra sulung Khalifah al-Mustanshir sekaligus calon pewaris sah, dan Ahmad Abi al-Qasim, seorang anak kecil yang diajukan oleh al-Afdhal atas rekomendasi Badr al-Jamali sebagai pengganti sang khalifah. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.563)

Pada saat itu, Hasan ibn al-Shabah, seorang dai Isma'iliyah dari Isfahan, datang ke Mesir untuk mendalami ajaran sektenya. Melihat konflik suksesi, ia meyakini bahwa pengangkatan Nizar sebagai Khalifah sejalan dengan doktrin Isma'iliyah yang mengharuskan seorang imam merupakan anak tertua dari pemimpin sebelumnya. Pandangan ini ia sebarkan dan mendapat sambutan luas. Hal ini membuat Hasan dipandang sebagai ancaman oleh Badr al-Jamali, yang kemudian menjebloskannya ke penjara dan berusaha mengasingkannya ke wilayah Maghribi. Namun, kapal yang membawanya terdampar di pantai Syam akibat badai. Hasan selamat dan kembali ke Isfahan, lalu menyebarkan ajaran tentang keabsahan Nizar sebagai pemimpin sah. Kelompok pengikutnya kemudian dikenal sebagai Isma'iliyah Tarariyah.(Hidayat, 2021, hlm.51)

Selama periode ini, kekuasaan sebenarnya berada di tangan para menteri. Setelah wafatnya Khalifah Musta'la Ahmad Abi al-Qasim pada tahun 495 H, perdana menteri al-Afdhal menunjuk putra sang Khalifah yang baru berusia lima tahun, Abu Ali, sebagai pengganti dengan gelar "al-Amir." Ketika dewasa, al-Amir merasa cukup kuat dan tidak sabar untuk mengambil kembali kekuasaan. Pada tahun 515 H, ia merancang pembunuhan terhadap al-Afdhal.

Namun, situasi tetap tidak stabil. Setelah al-Amir terbunuh pada 524 H, Abdul Majid Abi al-Maymun al-Hafizh naik takhta. Tetapi, tidak lama kemudian, kekuatan militer memberontak dan mengangkat Abu Ali Ahmad ibn al-Afdhal sebagai perdana menteri. Dalam waktu singkat, kekuasaan penuh ada di tangannya hingga ia mampu memenjarakan sang Khalifah. Berbeda dengan para pendahulunya, Ibnu Afdhal adalah penganut Syi'ah

Imamiyah. Untuk mengimbangi pengaruh sekte lain, ia menunjuk empat qadhi dari mazhab yang berbeda — Isma'iliyah, Imamiyah, Maliki, dan Syafi'i — dan memberi wewenang mereka menyelesaikan perkara sesuai ajaran masing-masing mazhab. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam.(Walker, 1995, hlm.187)

Pemerintahan Ibnu Afdhal berakhir tragis ketika ia dibunuh oleh kelompok Isma'iliyah pada 526 H. Khalifah Abdul Majid pun dibebaskan dari penjara dan kembali memimpin. Sementara itu, seorang gubernur Armenia, Bahram al-Armani, yang bercita-cita tinggi, berhasil merebut posisi perdana menteri pada 529 H melalui pengepungan Kairo. Selama masa pemerintahannya, ia menunjukkan keberpihakan pada etnis Armenia, mengizinkan pembangunan gereja secara masif, bahkan sampai setiap rumah orang Armenia memiliki gereja pribadi. Namun, kekuasaannya berakhir setelah Ridhwan ibn Walkhasyi berhasil menggulingkannya pada 530 H. Ironisnya, Ridhwan sendiri akhirnya dibunuh setelah berusaha melengserkan Khalifah al-Mustanshir.(Husaini -Ahmad, 2020, hlm.45)

Sepanjang masa ini, persaingan kekuasaan antara para menteri dan upaya pengangkatan Khalifah selalu dibumbui intervensi, bahkan mengesampingkan prinsip-prinsip ajaran Isma'iliyah. Ketegangan politik meningkat menjelang keruntuhan Dinasti Fathimiyah. Persaingan merebut kursi perdana menteri melibatkan pihak asing. Contohnya adalah Syawar, menteri yang digulingkan oleh jenderal Dhargham pada 558 H. Ia meminta bantuan Nuruddin Mahmud dari Damaskus, yang menyanggupi dengan imbalan sepertiga pendapatan Mesir. Syawar kembali berkuasa pada 559 H, tapi kemudian mengkhianati Nuruddin dengan meminta Syirkuh kembali ke Syam, bahkan bersekutu dengan pasukan Salib dari Yerusalem.(Amikam Eald, 1994, hlm.215)

Pada 562 H, Syirkuh kembali menyerbu Mesir, kali ini bersama keponakannya, Saladin. Ketika Syawar kabur, pasukan Frank datang membantu Mesir dan bentrok dengan pasukan Syirkuh di Babayn. Setelah menang, Syirkuh memperkuat posisi di Sha'id sebelum menuju Alexandria, menempatkan Saladin di sana. Saat pasukan gabungan Frank dan Mesir mengepung kota itu, Syirkuh datang menyelamatkan dan berhasil memaksa mereka menerima perdamaian.(Paul E.Walker, 1997, hlm.211)

Namun, perjanjian dilanggar. Pasukan Frank tetap tinggal di Mesir, bahkan menjalin aliansi formal dengan Syawar. Mereka menuntut uang tahunan dari kas Mesir. Dalam situasi ini, Syawar membakar kota Fusthath agar tidak jatuh ke tangan pasukan Salib. Ia lalu menghubungi Nuruddin dan bersedia menyerahkan sepertiga wilayah Mesir sebagai kompensasi. Nuruddin mengirim Syirkuh kembali ke Mesir pada 564 H. Kali ini, ia disambut

baik oleh Khalifah al-'Adhid. Syirkuh ditunjuk sebagai perdana menteri dan mengeliminasi Syawar yang berkhianat.(Halm-Heinz, 1997, hlm.200)

Syirkuh wafat tiga bulan kemudian. Saladin pun ditunjuk sebagai penerusnya. Dengan kebijakan dermawan dan penunjukan loyalis dalam pemerintahan, Saladin segera meraih simpati rakyat. Namun, elit Fathimiyah yang resah atas pengaruhnya menggalang konspirasi dan mengundang Frank untuk menggulingkannya. Saladin menanggapi dengan taktik cerdas, termasuk memprovokasi pemberontakan tentara Sudan yang akhirnya berhasil dipadamkan.(Daftary, 1990, hlm.270)

Sementara itu, koalisi Frank dan Byzantium berusaha merebut Dimyath pada 565 H, namun berhasil digagalkan oleh pasukan gabungan Saladin dan bala bantuan Nuruddin. Bahkan, Khalifah al-'Adhid turut mendukung dengan memberi bantuan dana dan logistik.

Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan, Saladin melancarkan gerakan Islamisasi untuk menghapus pengaruh Syi'ah di Mesir. Ia membangun madrasah untuk mazhab Syafi'i dan Maliki, memecat para hakim Syi'ah, dan mengangkat qadhi agung bermazhab Sunni. Akhirnya, pada 567 H, nama Khalifah Abbasiyah mulai disebut dalam khutbah menggantikan Khalifah Fathimiyah. Tak lama setelahnya, al-'Adhid wafat, menandai berakhirnya era Dinasti Fathimiyah di Mesir. (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm.570)

4. KESIMPULAN

Jejak kekuasaan Dinasti Fatimiyah mencerminkan dinamika politik, keagamaan, dan sosial yang kompleks dalam sejarah Islam abad pertengahan. Perebutan wilayah Maghribi menjadi tonggak awal ekspansi kekuasaan mereka, yang menunjukkan kemampuan militer dan legitimasi ideologis yang kuat melalui dakwah Ismailiyah. Penaklukan Mesir menandai puncak kejayaan Fatimiyah, yang menjadikan Kairo sebagai pusat pemerintahan dan peradaban, serta simbol supremasi kekhalifahan tandingan dari Abbasiyah. Dalam konteks ini, kemunculan Sekte Darazi mencerminkan pergolakan internal dalam tubuh pemikiran Ismailiyah itu sendiri, sekaligus menjadi cerminan bagaimana ide-ide keagamaan dapat berkembang radikal ketika bersinggungan dengan kekuasaan. Secara keseluruhan, Dinasti Fatimiyah bukan hanya mencatatkan sejarah politik yang luas, tetapi juga meninggalkan warisan pemikiran dan perdebatan keagamaan yang signifikan dalam sejarah Islam.

REFERENSI

Daftary, F. (1990). The Ismailis: Their history and doctrines. Cambridge: Cambridge University Press.

Elad, A. (1993). The conquest of Egypt by Saladin. Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, 3(2), 125–143.

Halm, H. (1997). The Fatimids and their traditions in Islam. London: I.B. Tauris.

Hitti, P. K. (2013). History of the Arabs (R. C. L. Yasin & D. S. Riyadi, Trans.; 1st ed.). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Ibrahim, Q. A., & Saleh, M. A. (2014). Sejarah Islam: Jejak langkah peradaban Islam dari masa Nabi hingga masa kini. Kairo: Mu'assasah Iqra.

Lapidus, I. M. (2014). A history of Islamic societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Lev, Y. (1999). Saladin in Egypt. Leiden: Brill.

Nofrianti, M., & Maghfira, S. (2024). Dinasti Fathimiyyah di Mesir (909–1171): Dinasti Syi'ah Ismailliyah. Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci, 2(1), International Conferences on Islamic Studies (ICIS).

O'Leary, D. L. (1923). A short history of the Fatimid Khalifate. London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co.

Setia, S. (2016). Dinasti Fatimiyah: Muncul, perkembangan dan kehancurannya. Jurnal Rihlah, 2(2), 123–135. (Jika ada halaman, mohon tambahkan.)

Sulasman, S. (2013). Sejarah Islam di Asia dan Eropa (dari masa klasik hingga masa modern). Bandung: CV Pustaka.

Usman, A. L. (1976). Ringkasan sejarah Islam. Jakarta: Wijaya.

Walker, P. E. (2002). Exploring an Islamic empire: Fatimid history and its sources. London: I.B. Tauris.